

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Esensi demokrasi adalah kedaulatan, sejatinya kedaulatan yang dimaksudkan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal tersebut tertera secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya tidak ada absolutisme kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Urgensi atas hal tersebut sering dengan pilihan akan sistem demokrasi pasca 1998 yang mengembalikan kedaulatan tertinggi tidak lagi dikuasai oleh segelintir elit kekuasaan namun daulat atas rakyat dikembali kepada nilai dasar yang mana rakyat yang berkuasa atas kekuasaan itu sendiri. Peristiwa atas dinamika tersebut tentunya diperhadapkan dengan berbagai macam problem, hal ini yang kemudian membuat Indeks Demokrasi Indoneisa (IDI) belum masuk dalam kategori sebagai Negara demokrasi.

Salah satu prasyarat utama bagi Negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu, artinya mutu demokrasi baik atau buruk tergantung dari sistem Pemilu yang di anut oleh Negara tertentu. Sebagai Negara berkembang, tentunya pilihan atas formulasi pemilu dalam menyongsong keutuhan dari sistem demokrasi adalah hal yang tidak bisa di tawar, sejak pasca 1998 kita diperhadapkan dengan pilihan atas hal tersebut, dimana pengakuan atas demokratisasi menjadi bagian terpenting dalam perjalanan sistem politik Indonesia.

Pada tahapan tertentu, sebelum 2004 representatif kedaulatan rakyat seperti yang dikemukakan di atas masih mencerminkan pengambilan kekuasaan

atas daulat rakyat melalui lembaga representatif yang didaulati melalui Pemilu. Namun demikian, hal ini bukan merupakan jawaban atas apa yang menjadi interpretasi Pemilu sebagai representasi daulat rakyat. Hal ini menandakan bahwa kedaulatan rakyat atas pilihan politik rakyat harus diposisikan sebagai agenda prioritas dalam sistem politik Indonesia.

Tidak serta merta, semangat mendemokratisasikan demokrasi pada berbagai macam level melalui Pemilu bisa terjewantahkan lewat regulasi yang mengatur tentang Pemilu yang demokratis pasca reformasi. Disisi lain, tuntutan atas demokratisasi, sementara kita masih disibukkan dengan berbagai macam masalah lingkup Pemilu itu sendiri. Artinya permasalahan besar yang dihadapi oleh kita adalah bentuk dari keniscayaan atas bentuk sistem bernegara yang diyakini dapat menempuh berbagai persoalan mengenai dengan Pemilu sebagai agenda representasi daulat rakyat.

Hingga saat ini, dalam perspektif sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah Negara bangsa yang menunjukkan kepada dunia termasuk Amerika Serikat bahwa esensi demokrasi berawal dari semangat 1998 yang merubah tatanan demokrasi Indonesia sebagai pengejawantahan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kita mengalami beberapa fase dalam penyelenggaraan Pemilu sejak 2004, dimana masyarakat lokal diberikan kewenangan penuh untuk mendaulati kekuasaan. Namun demikian yang menjadi permasalahan adalah apakah konsekuensi atas daulat tersebut menjadi hambatan atas proses demokratisasi masyarakat lokal.

Permasalahan mendasari pemikiran tersebut berawal dari pemikiran peneliti bahwa dalam narasi keterbukaan atas partisipasi yang semakin terbuka,

apakah dalam narasi tersebut terdapat kesimpang siuran dalam persoalan demokratisasi lokal. Dari berbagai perdebatan. Layaknya diantara berbagai kelompok kepentingan tertentu akan terfragmentasi pada bentuk dikotomi kekuasaan dalam berbagai macam level yang selalu menjadi agenda ketidakpastian dalam menyokong demokrasi lokal.

Semangat regulasi melalui UU No. 32. Disinyalir secara jelas bahwa arena kompetisi bagi elit lokal sudah dibatasi dalam berbagai macam level. Artinya apa yang dirasakan oleh masyarakat kecamatan Dulupi merupakan bagian dari keniscayaan atas persoalan yang terjadi diantara pertentangan demokrasi lokal. Data tersebut dan disesuaikan dengan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, tergambar bahwa dinamika Pemilu 2019 tidak terlepas dari berbagai prahara mengenai eksistensi masyarakat lokal ketika diperhadapkan dengan kepentingan elit lokal.

Dari berbagai macam temuan dan disesuaikan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat temuan data lapangan bahwa terdapat hubungan yang mengsingkronkan antara kemenangan PDIP di kabupaten Boalemo dengan pertarungan politik yang tetap melibatkan kelompok kepentingan. Hal ini pun sangat beririsan dengan berbagai macam spekulasi antara Bupati Darwis Moridu beserta jajaran kekuasaan birokrasi. Pada tahapan tertentu dapat dipastikan bahwa terdapat 4 orang sebagai petahanan, namun demikian, di saat yang bersamaan terdapat anak dan istri bupati terpilih sebagai anggota dewan Kabupaten Boalemo.

Tentunya terdapat bagian yang menjadi kekuatan inti strategi mobilisasi, arti selain sebagai anggota partai, strategi yang dilakukan adalah melalui kekuatan informal Negara yang ditandai lewat pinjaman petani terhadap modal Darwis Moridu. Dilain sisi, modal sosial yang dimiliki oleh Harijanto Mamangkey tidak mencerminkan agenda sosialisasi figur atau partai tertentu di saat Pemilu. Artinya dalam tahapan tertentu, strategi mobilisasi partai sangat penting karena tidak bisa di pungkiri bahwa kemenangan PDIP di tingkat kabupaten pada Pemilu 2019 tidak terlepas dari hasrat kekuasaan kepala daerah sebagai pengurus partai PDIP. Merujuk pada hal tersebut, penulis tertarik dalam menyikapi persoalan **Strategi Mobilisasi Politik PDIP Dalam Pemenangan Pemilu 2019 Di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.**

1.2 Rumusan Masalah

Atas rujukan latar belakang pemikiran tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian mencakup :

1. Bagaimana strategi Mobilisasi PDIP terhadap kemenangan partai di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019 ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi strategi mobilisasi PDIP dalam mempengaruhi strategi mobilisasi dukungan pemilih pada Pemilu 2019 di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Masalah

Berangkat dari rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini mencakup :

1. Mengetahui bagaimana strategi Mobilisasi PDIP terhadap kemenangan partai di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo pada Pemilu Tahun 2019
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi strategi mobilisasi PDIP dalam mempengaruhi strategi mobilisasi dukungan pemilih pada Pemilu 2019 di Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis harapan peneliti dari hasil penelitian ini bisa memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) Menjadi acuan dalam mengetahui strategi mobilisasi politik partai PDIP di Kabupaten Boalemo.
- 2) Menjadi bahan kontribusi akademis guna mengembangkan konsep serta teori mengenai strategi mobilisasi politik.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsi pemikiran bagi peneliti di masa yang akan datang untuk di jadikan sebagai bahan acuan.